

PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Baiq Dewi Kamariani (1), Siti Hidayatul Jumaah (2), Asrifia Ridwan (3)

^{1,2}Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong

³Universitas Merdeka Madiun

Email Korespondensi: baiqdewikamariani95@gmail.com

Abstrak: Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya dan beragam. Namun, perkembangan pariwisatanya masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti infrastruktur, aksesibilitas, kualitas layanan wisata, serta tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah meningkatnya arus wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam potensi dan tantangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, serta merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari keindahan alam, budaya, dan sejarah. Namun, dibalik potensi tersebut, tersimpan berbagai tantangan, meliputi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi potensial, tekanan terhadap lingkungan berupa alih fungsi lahan, meningkatnya volume sampah, dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas wisata. Pergeseran nilai budaya lokal ketika budaya global yang dibawa wisatawan juga turut menjadi tantangan. Dari aspek kolaborasi, baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal diketahui belum intensif. Oleh karena itu kedepannya perlu diadakan kolaborasi yang lebih intensif hal ini akan mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus melestarikan warisan budaya.

Kata kunci; Pembangunan, Pariwisata, Berkelanjutan, Kabupaten Lombok Timur.

Abstract: East Lombok Regency has rich and diverse tourism potential. However, its tourism development still faces several issues, such as infrastructure, accessibility, quality of tourism services, and challenges in preserving the environment and local culture amidst the increasing influx of tourists. This study aims to more deeply identify the potential and challenges of tourism development in East Lombok Regency, and formulate a sustainability-oriented tourism development strategy. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques using interviews and document analysis. Data were analyzed through data reduction, data presentation in the form of thematic narratives, and inductive conclusion drawing with source triangulation to ensure validity. The results show that East Lombok Regency has diverse tourism potential, ranging from natural beauty, culture, and history. However, behind this potential, various challenges lie, including limited infrastructure and accessibility to potential destinations, pressure on the environment in the form of land conversion, increasing waste volume, and ecosystem damage due to tourism activities. The shift in local cultural values when tourists bring global culture also poses a challenge. In terms of collaboration, both between the government, the private sector, and local communities is known to be less intensive. Therefore, in the future, more intensive collaboration is needed. This will create sustainable tourism that improves the welfare of local communities, maintains environmental sustainability, and preserves cultural heritage.

Keywords: Development, Tourism, Sustainable, East Lombok Regency.

Article History :

Received 08-06-2025; Revised 20-06-2025; Accepted 27-07-2025

PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata pada era globalisasi saat ini menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya suatu daerah (UNWTO, 2022). Namun demikian, dalam skala regional maupun global, sektor ini juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Intensitas persaingan antar destinasi wisata menuntut setiap daerah untuk tidak hanya menawarkan daya tarik yang unik, tetapi juga mengelola destinasi secara berkelanjutan (Sedarmayanti, 2018; Inskeep, 1991).

Menurut teori *triple bottom line* (Elkington, 1997), pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga dimensi utama, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pendekatan ini relevan dalam menjawab isu keseimbangan antara kebutuhan saat ini dengan kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang (Butler, 1999). Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan destinasi yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal (Kamariani et al., 2021). Selaras dengan itu, WTO (2024) menggarisbawahi bahwa keberlanjutan pariwisata tercermin melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, konservasi lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya setempat.

Di Indonesia, pembangunan pariwisata tidak terlepas dari peran tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat (Sedarmayanti, 2018). Pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia infrastruktur pendukung, sementara pelaku usaha dan masyarakat lokal menjadi aktor langsung dalam penyediaan layanan pariwisata. Kolaborasi ketiganya sangat menentukan arah dan kualitas pengembangan destinasi.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya dan beragam. Potensi tersebut meliputi panorama alam pegunungan di Sembalun, keunikan warna pasir Pantai Pink, sejarah benteng Jepang di Tanjung Ringgit, pesona bawah laut Teluk Ekas, hingga ekowisata Bale Mangrove di Jerowaru. Destinasi-destinasi tersebut menawarkan konsep wisata berbasis alam (*nature-based tourism*), budaya (*cultural tourism*), hingga petualangan (*adventure tourism*) yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara (Dinas Pariwisata NTB, 2023). Wilayah ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari kawasan Sembalun dengan lanskap lembah dan perbukitan yang memukau, Pantai Pink dengan pasir unik berwarna merah muda, hingga Tanjung Ringgit dan Teluk Ekas yang menawarkan keindahan laut dan keanekaragaman hayati (BPS Lombok Timur, 2023). Selain itu, Lombok Timur juga kaya akan budaya dan tradisi lokal yang menjadi daya tarik tersendiri.

Namun demikian, perkembangan pariwisata di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang belum optimal terutama menuju destinasi-destinasi terpencil, kualitas layanan wisata yang belum seragam, serta tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah meningkatnya arus wisatawan. Meski demikian, pertumbuhan kunjungan wisatawan yang terus meningkat membawa konsekuensi pada tekanan terhadap lingkungan serta perubahan pola hidup masyarakat setempat (Wijaya et al., 2021). Hal ini memunculkan tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Di beberapa kawasan, terjadi alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, dan ancaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal (Yuliarini & Suryana, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan (Timothy, 1998; Telfer & Sharpley, 2016). Model kolaboratif multi-stakeholder dianggap mampu meningkatkan kualitas destinasi sekaligus memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat lokal terhadap dinamika pariwisata global. Kolaborasi telah memperkuat kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan (Kumala et al., 2024). Melibatkan para stakeholder dalam proses perencanaan akan menghasilkan strategi pariwisata yang dapat diterima dengan baik, mencegah konflik selama implementasi kebijakan, dan menyatukan individu-individu yang secara langsung dan

tidak langsung terlibat dalam industri pariwisata (Yesayabela et al., 2023). Pada tabel 1 ini menjelaskan secara sederhana.

Tabel 1. Teori konsep

No	Teori/Konsep	Penjelasan Singkat	Referensi
1	<i>Triple Bottom Line (TBL)</i>	Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial.	Elkington (1997)
2	Pariwisata Berkelanjutan	Pengembangan pariwisata yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang.	Butler (1999); WTO (2004)
3	Kolaborasi Multi-Stakeholder	Pendekatan pengelolaan pariwisata yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat untuk keberlanjutan.	Timothy (1998); Telfer & Sharpley (2016)
4	Konsep <i>Nature-Culture-Adventure Tourism</i>	Model produk wisata yang menggabungkan potensi alam, budaya, dan petualangan.	Inskeep (1991)

Sumber: Data diolah Penulis, 2025.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi secara lebih mendalam potensi dan tantangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, serta merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Digunakan untuk memahami konteks dan dinamika Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara berdasar stakeholder pariwisata seperti pemerintah daerah, pengusaha pariwisata dan Masyarakat lokal. Selain wawancara, pengumpulan data yang adalah analisis dokumen seperti dokumen rencana Pembangunan pariwisata, laporan kegiatan pariwisata dan data statistik pariwisata. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur memiliki keunggulan daya tarik wisata yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan sejarah. Lanskap Sembalun dengan lembah dan pegunungan yang memesona, Pantai Pink dengan pasir berwarna unik muda yang unik, kawasan Teluk Ekas dan Tanjung Ringgit yang kaya dengan pesona biota lautnya menjadi modal penting pengembangan pariwisata berbasis alam, terdapat ekowisata Bale Mangrove di Jerowaru dan situs sejarah benteng Jepang (Inskeep, 1991). Selain itu, tradisi dan budaya lokal yang masih terjaga menjadi potensi besar untuk mengembangkan *cultural tourism* yang dapat meningkatkan identitas dan kebanggaan masyarakat. Destinasi tersebut membentuk model *nature-culture-adventure tourism* (Inskeep, 1991), yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Data BPS Lombok Timur (2023) menunjukkan kenaikan signifikan jumlah kunjungan wisatawan, dari sekitar 94.000 pada tahun 2022 menjadi lebih dari 127.000 pada 2024. Hal ini menegaskan potensi ekonomi yang besar dari sektor pariwisata bagi daerah. Melihat kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur khususnya pada sektor pariwisata tentu jika dikelola dengan memperhatikan aspek Suplay yang mengedepankan kolaborasi yang baik tentu sektor pariwisata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Namun secara existing kondisi pariwisata Kabupaten Lombok Timur masih memerlukan perhatian lebih serius (Bahri et al., 2022).

Tantangan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Meski potensi tersebut sangat besar, pengembangan pariwisata di Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius. Menurut konsep *triple bottom line* (Elkington, 1997), keberlanjutan pembangunan harus memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Seperti ketersediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitas menuju destinasi wisata yang memadai, akses internet, penerangan jalan, transportasi, serta sarana-prasara penunjang lainnya seperti toilet, tempat ibadah. Menurut konsep *triple bottom line* (Elkington, 1997), pembangunan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya agar berkelanjutan. Namun di lapangan, Kabupaten Lombok Timur menghadapi berbagai tantangan, antara lain: Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi potensial yang membuat wisatawan enggan datang. Tekanan terhadap lingkungan berupa alih fungsi lahan, meningkatnya volume sampah, dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas wisata (Wijaya et al., 2021). Pergeseran nilai budaya lokal, ketika budaya global yang dibawa wisatawan mulai mempengaruhi tradisi dan adat setempat sehingga berpotensi mengikis identitas (Yuliarini & Suryana, 2020). Hal ini sesuai dengan kajian Butler (1999) bahwa pariwisata berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana destinasi mampu mempertahankan kualitas lingkungan dan budaya lokal.

Strategi Kolaborasi Multi-Stakeholder

Pendekatan kolaborasi multi-stakeholder menjadi salah satu kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Timothy (1998) dan Telfer & Sharpley (2016) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai investor dan inovator, serta masyarakat lokal sebagai pemilik budaya dan lingkungan destinasi. Dengan kolaborasi ini, dapat dibentuk strategi: Penguatan regulasi tata ruang pariwisata untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Pengembangan program pelatihan SDM lokal agar mampu menjadi pemandu wisata profesional. Optimalisasi promosi digital melalui media sosial dan website pariwisata resmi untuk memperluas pasar. Pelaksanaan kampanye sadar wisata agar masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan adat. Dengan pendekatan ini, prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terwujud sebagaimana dirumuskan WTO (2004), yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan, dan menjaga warisan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pembangunan pariwisata di Lombok Timur sudah mengarah pada Pembangunan pariwisata berkelanjutan multi stakeholder, meskipun beberapa aktor masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pendekatan multi-stakeholder dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Timothy, 1998; Telfer & Sharpley, 2016).

Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, membuat kebijakan tata ruang, regulasi konservasi lingkungan, serta menyediakan infrastruktur pendukung. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memfasilitasi Pembangunan pariwisata melalui Kebijakan pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah (RIPARDA) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2038. Berdasarkan hasil penelitian Bahri et al., (2023) Penyelenggaraan secara administratif seperti penguatan pengelolaan dengan pembuatan dan pengesahan RIPARDA yang menjadikan sektor pariwisata daerah sebagai basis pendapatan daerah. Oleh karena itu RIPARDA sangat penting dalam mengembangkan kepariwisataan daerah. Dalam dokumen RIPARDA dijelaskan bahwa Kepariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur mengarah pada Pembangunan yang berkelanjutan. Dijelaskan pada pasal 7 bahwa pariwisata dijalankan secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal yang dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat di destinasi wisata, wisatawan, pelaku usaha dan pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas bahwa peran pemerintah dalam konteks regulator sudah berhasil dilakukan. Selain sebagai regulator, pemerintah juga berperan sebagai Fasilitator. Pada konteks Fasilitator, pemerintah memfasilitasi berupa penyelenggaraan pelatihan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Mengingat potensi wisata alam di Kabupaten Lombok Timur, pelatihan ini

dapat mencakup teknik konservasi, pengelolaan sampah, penghijauan, dan pengembangan energi terbarukan. Selain itu, Pemerintah mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi ekowisata dan Pemerintah memfasilitasi akses permodalan usaha Masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi regulator dan fasilitator sudah sesuai.

Swasta menjadi motor investasi dan inovasi, mengembangkan paket wisata, menyediakan sarana pendukung, serta melakukan promosi digital secara agresif. Kemajuan kepariwisataan suatu daerah tidak lepas dari peran krusial sektor swasta. Lickorish dkk (1994) mengatakan bahwa sektor swasta memiliki lima peran utama dalam pengembangan sebuah destinasi wisata. Ke lima peran tersebut adalah sektor swasta sebagai agen pembangunan dan penyediaan sarana akomodasi, pembuat toko-toko souvenir atau pusat perbelanjaan, penyedia sarana hiburan, pendukung sarana transportasi, dan yang terakhir berperan sebagai pendukung pengembangan atraksi wisata. Dalam kasus pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Lombok Timur sektor swasta yang berperan dalam program kerjasama pemerintah-swasta saat ini hanya mengambil bagian dalam dua peran dari lima peran sektor swasta yang dipaparkan oleh lickorish dkk. Ke dua peran tersebut adalah sebagai pembangunan dan penyediaan sarana akomodasi saja.

Partisipasi pihak swasta dalam membangun dan penyediaan sarana akomodasi Lombok Timur menjadi salah satu instrumen penting mewujudkan kemajuan bersama. Seperti halnya yang ditunjukkan PT. Hot Planet Indonesia. Memajukan kawasan selatan Lombok Timur sebagai salah satu destinasi wisata pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, perusahaan tersebut menghibahkan sebagian hak milik perusahaan untuk dibangun jalan umum. Secara resmi perusahaan tersebut menyerahkan hibah berupa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Penyerahan ditandai dengan penanda-tanganan perjanjian hibah yang berlangsung.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran swasta sebagai motor investasi dan inovasi bidang pariwisata di Kabupaten Lombok Timur masih belum maksimal. Peran swasta hanya pada Pembangunan dan penyediaan sarana akomodasi saja sedangkan empat peran lainnya masih belum terlihat. Hal tersebut menjadi permasalahan serius dalam aspek pariwisata daerah dan menjadi PR besar pemerintah dalam mengupayakan adanya peran swasta yang lebih besar lagi tidak hanya menjadi penyedia jasa akomodasi tetapi juga menjadi penyedia sarana liburan, pendukung sarana transportasi, dan yang terakhir berperan sebagai pendukung pengembangan atraksi wisata.

Masyarakat lokal sebagai pelaku langsung, penjaga budaya dan lingkungan, serta penerima manfaat ekonomi melalui jasa akomodasi, pemandu wisata, kuliner, dan kerajinan. Peran Masyarakat lokal berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan Pembangunan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi (Kumala, 2024). Peran Masyarakat lokal berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan (Fatin at al., 2024). program-program Mereka juga memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif selama proses berlangsung. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta peningkatan rasa memiliki terhadap hasil proyek yang dijalankan. program-program mereka juga memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif selama proses berlangsung. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta peningkatan rasa memiliki terhadap hasil proyek yang dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat saat ini dalam pariwisata masih rendah. Kelompok sadar wisata pada setiap kecamatan bahkan desa sudah terbentuk. Namun karena kurangnya pengetahuan tentang tujuan dan fungsi serta pengelolaan komunitas kelompok sadar wisata ini, keberadaannya saat ini tidak begitu aktif dan peranannya dalam memberikan pemahaman kesadaran wisata pada masyarakat masih rendah. Peran masyarakat untuk membangun industri pariwisata termasuk akomodasi dan transportasi wisatawan belum signifikan. Faktor penyebab rendahnya partisipasi Masyarakat yang paling krusial dalam pengembangan pariwisata daerah adalah belum adanya sosialisasi tentang arah Pembangunan pariwisata daerah yang

sudah tertuang dalam Perda nomor 4 tahun 2024 tentang RIPARDA Lombok Timur. Hal tersebut menjadi faktor turunan bagi Masyarakat lokal karena ketidaktauannya tentang hal tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa partisipasi Masyarakat lokal dalam Pembangunan kepariwisataan daerah masih rendah. Salah satu faktornya diketahui bahwa arah Pembangunan kepariwisataan daerah yang tertuang dalam RIPARDA Lombok Timur belum banyak diketahui oleh Masyarakat lokal khususnya para pelaku wisata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempatnya terlebih instansi yang menjadi leading sektor seperti Dinas Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Bappeda untuk melakukan sosialisasi terkait dengan arah Pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah kabupaten Lombok Timur.

Sesuai dengan pendekatan *multi-stakeholder* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Timothy, 1998; Telfer & Sharpley, 2016). Kolaborasi antar pemerintah, swasta dan Masyarakat lokal di Kabupaten Lombok Timur belum intensif. Oleh karena itu kedepannya perlu diadakan kolaborasi yang lebih intensif hal ini akan mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus melestarikan warisan budaya, selaras dengan indikator WTO (2004).

KESIMPULAN

Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari keindahan alam, budaya, dan sejarah. Namun demikian, dibalik potensi tersebut, tersimpan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Timur dalam mengembangkan pariwisatanya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi potensial yang membuat wisatawan enggan datang, tekanan terhadap lingkungan berupa alih fungsi lahan, meningkatnya volume sampah, dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas wisata. Pergeseran nilai budaya lokal ketika budaya global yang dibawa wisatawan juga turut menjadi tantangan karena dapat mempengaruhi tradisi dan adat setempat sehingga berpotensi mengikis identitas. Dari aspek kolaborasi, penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah baik dari aspek regulator maupun fasilitator sudah cukup sesuai. Sementara peran swasta sebagai motor investasi dan inovasi bidang pariwisata di Kabupaten Lombok Timur masih belum maksimal. Peran swasta hanya pada pembangunan dan penyediaan sarana akomodasi saja sedangkan peran lainnya masih belum terlihat. Partisipasi masyarakat saat ini juga dinilai relatif masih rendah. Kelompok sadar wisata pada setiap kecamatan bahkan desa sudah terbentuk. Namun karena kurangnya pengetahuan tentang tujuan dan fungsi serta pengelolaan komunitas kelompok sadar wisata ini, keberadaannya saat ini tidak begitu aktif dan peranannya dalam memberikan pemahaman kesadaran wisata pada masyarakat masih rendah. Peran lain dari masyarakat untuk membangun industri pariwisata termasuk akomodasi dan transportasi wisatawan juga terlihat belum signifikan. Dengan demikian, maka kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal diketahui belum intensif. Oleh karena itu kedepannya perlu diadakan kolaborasi yang lebih intensif hal ini akan mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus melestarikan warisan budaya.

REFERENSI

Afifah Dina Fatin, Florensia Devina, Moh. Musleh. Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jap Jurnal Administrasi Publik*, Volume 15 Nomor 1 Juni 2024.

Baiq Dewi Kamariani, Wike, Imam Hanafi. (2021). The Public Relation in Torism Promotion Strategy of East Lombok Regency. *Wacana*– Vol. 24, No. 1.

- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25.
- Dinas Pariwisata NTB. (2023). *Laporan Tahunan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*.
- Gading Berlian Wati Nur Kumala, Atha Nabila Raharjo, Moh. Musleh, Lunariana Lubis. (2024). Model Kolaborasi Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Berbasis Pentahelix. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Agustus 2024, Volume 10, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X).
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*.
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.
- Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2016). *Tourism and Development in the Developing World*.
- Timothy, D. J. (1998). Cooperative tourism planning in a developing destination. *Journal of Sustainable Tourism*, 6(1), 52-68.
- UNWTO. (2022). *International Tourism Highlights*.
- Wijaya, M., Suryana, I. K., & Yuliarmi, N. N. (2021). *Dampak perkembangan pariwisata terhadap sosial budaya masyarakat lokal*.
- WTO. (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*.
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327–346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>.
- Yuliarmi, N. N., & Suryana, I. K. (2020). *Tantangan pembangunan pariwisata berkelanjutan*.